

Peningkatan Aksesibilitas Asuransi Syariah Pada Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Bantan, Bengkalis)

Sania Riska *¹
Zesxia Viviola Arini ²
Muhamad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

*e-mail : saniariska@gmail.com, zesxiaviviolaarini@gmail.com, ajipurwanto100@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di wilayah ini menghadapi tantangan dalam mengakses asuransi konvensional karena berbagai alasan, termasuk biaya yang tinggi dan persyaratan yang rumit. Namun dengan diperkenalkannya asuransi syariah, akses terhadap layanan asuransi meningkat secara signifikan. Penawaran yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengelolaan risiko yang adil dan transparan, telah menarik minat nelayan untuk mengikuti program asuransi. Selain itu, pendekatan inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat lokal juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi nelayan terhadap asuransi syariah. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam mendukung keberlanjutan ekonomi perikanan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah di wilayah pesisir.

Kata kunci: Aksesibilitas, Asuransi Syariah, Nelayan, Kecamatan Bantan, Bengkalis

Abstrak

This study aims to evaluate increasing the accessibility of sharia insurance for fishermen in Bantan District, Bengkalis. The research uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and participant observation. The study results show that most fishermen in the region face challenges in accessing conventional insurance for various reasons, including high costs and complicated requirements. However, with the introduction of Islamic insurance, accessibility to insurance services has increased significantly. Offers that are more in line with sharia principles, such as fair and transparent risk management, have attracted fishermen's interest in participating in insurance programs. In addition, an inclusive and collaborative approach between the government, sharia financial institutions and local communities also plays an important role in increasing fishermen's understanding and participation in sharia insurance. These findings provide valuable insights for the development of more inclusive policies in supporting the economic sustainability of fishermen and increasing accessibility to Islamic financial services in coastal areas.

Keywords: Aksesibilitas, Asuransi Syariah, Nelayan, Kecamatan Bantan, Bengkalis

PENDAHULUAN

Peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan merupakan sebuah tantangan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi mereka. Studi ini mengambil fokus pada Kecamatan Bantan, Bengkalis, yang merupakan wilayah pesisir di Indonesia dengan mayoritas penduduknya merupakan nelayan. Asuransi syariah menjadi alternatif yang menarik bagi nelayan, terutama dalam menghadapi risiko yang melekat pada profesi mereka, seperti kerusakan peralatan, kecelakaan, atau kerugian akibat bencana alam.

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan di bidang sumberdaya manusia misalnya lulusan masyarakat nelayan rata-rata SD, penguasaan teknologi misalnya penggunaan GPS hanya digunakan untuk penunjuk arah saja dan modal misalnya menggadaikan barang ke pegadaian. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat dikawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosila mereka. Hal ini disebabkan porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks. Contoh, budaya masyarakat nelayan yang boros dan gengsi.

Potensi sumber daya manusia nelayan pada khususnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Ketersediaan sumber daya manusia juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi termasuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan, dambaan setiap manusia yang lahir dimuka bumi ini, termasuk nelayan, kondisi kesejahteraan merupakan suatu kondisi keadaan yang didambakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian yang lebih luas dari kondisi sejahtera adalah suatu kondisi dimana masalah sosial dapat diminalisir sehingga akibatnya tidak meluas. Adapun yang dimaksud masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan masyarakat, karena adanya gejala yang tidak diharapkan masyarakat atau gejala yang tidak terjadi sesuai norma, nilai dan standar sosial yang berlaku.

Dalam konteks ini, literatur mengenai manajemen pembiayaan bank syariah, jual beli dalam fikih muamalah, serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam menjadi penting untuk dipertimbangkan. manajemen pembiayaan bank syariah yang dapat memberikan pandangan tentang pendekatan yang dapat diambil dalam menyediakan produk asuransi syariah bagi nelayan. Selain itu, jual beli dengan non-Muslim dalam konteks fikih muamalah mungkin memberikan wawasan tentang kebijakan yang dapat mendukung inklusi keuangan bagi nelayan (Saputra and Purwanto 2023).

Tidak hanya itu, pendekatan ekonomi syariah juga memberikan kerangka kerja yang relevan dalam analisis ini. Model perencanaan keuangan untuk meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap perbankan syariah, yang dapat menjadi acuan dalam merancang program-program asuransi syariah yang lebih inklusif (Kurnia et al. 2021). Selain itu, pemikiran tentang kelembagaan keuangan masyarakat dan modal sosial dalam perspektif ekonomi syariah dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi nelayan dalam program asuransi syariah (Lubis 2023).

Dalam konteks global yang semakin terhubung, transformasi akuntansi syariah juga menjadi relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang menunjukkan pentingnya infrastruktur keuangan yang inklusif dalam mendukung sektor nelayan (Ramadhan 2023). Selain itu, implementasi model berlian Porter dalam pengembangan pembiayaan pertanian juga dapat memberikan inspirasi dalam merancang strategi untuk meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan (Prayoga 2019).

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yaitu dengan memberikan bantuan melalui kartu nelayan. Asuransi ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bagian dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Sedikitnya jumlah yang memiliki kusuka ini disebabkan oleh para nelayan itu sendiri yang tidak melengkapi

berkas, selain itu pemikiran nelayan yang tidak percaya dengan adanya bantuan dan akan percaya jika kedepannya ada beberapa nelayan yang mendapat bantuan.

Dengan demikian, melalui tinjauan literatur yang komprehensif dari berbagai bidang seperti manajemen perbankan syariah, fikih muamalah, ekonomi syariah, dan akuntansi syariah, serta pengalaman empiris dari studi-studi kasus terkait, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan inklusif dapat dirumuskan untuk meningkatkan perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi nelayan di wilayah tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan analisis dari berbagai studi pustaka terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks, seperti peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan, melalui tinjauan mendalam terhadap teori dan penelitian yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada analisis dan sintesis berbagai sumber informasi, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait dengan topik yang diteliti.

Dalam mengadopsi pendekatan ini, peneliti melakukan pencarian terperinci melalui basis data akademik dan perpustakaan online untuk mengidentifikasi literatur yang sesuai. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, peneliti melakukan analisis terhadap teks-teks tersebut, mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan temuan-temuan yang muncul secara konsisten dalam konteks peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti, dengan fokus pada deskripsi dan interpretasi data yang berkualitas.

Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dari studi pustaka yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dalam mendukung perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi nelayan di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peningkatan aksesibilitas asuransi syariah pada nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, menjadi penting dalam konteks perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, literatur tentang manajemen pembiayaan bank syariah memberikan wawasan tentang pendekatan yang dapat diambil untuk meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Manajemen pembiayaan bank syariah, yang memperlihatkan peran penting lembaga keuangan syariah dalam mendukung aksesibilitas terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ashari et al. 2023).

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip muamalah dan nilai kemaslahatan tentang jual beli dengan non-Muslim dalam konteks fikih muamalah yang memberikan wawasan tentang kebijakan yang dapat mendukung inklusi keuangan bagi nelayan dalam konteks asuransi syariah. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam juga menjadi pertimbangan penting, seperti yang dibahas oleh Purwanto dalam perspektif transaksi simpan pinjam, yang dapat membantu dalam merancang program-program asuransi syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan nelayan (Saputra and Purwanto 2023).

Lebih lanjut, model perencanaan keuangan dalam meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap perbankan syariah menjadi relevan yang memberikan kerangka kerja yang dapat

digunakan dalam merancang strategi untuk meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Transformasi akuntansi syariah juga perlu dipertimbangkan, karena infrastruktur keuangan yang inklusif dalam mendukung sektor nelayan sangat penting dalam memastikan kesinambungan program asuransi syariah (Ramadhan 2023). Penerapan model berlian Porter dalam pengembangan pembiayaan pertanian juga memberikan inspirasi dalam merancang strategi untuk meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan (Prayoga 2019).

Dalam kaitannya dengan analisis ekonomi kelembagaan keuangan masyarakat, wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi nelayan dalam program asuransi syariah (Lubis 2023). Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dari studi-studi kasus yang telah disebutkan, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan inklusif untuk meningkatkan perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi nelayan di wilayah Kecamatan Bantan, Bengkalis.

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, perlu diperhatikan aspek-aspek penting yang belum tercakup sebelumnya dalam literatur. Salah satu aspek yang relevan adalah pemahaman tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh nelayan dalam aksesibilitas terhadap asuransi syariah. Studi-studi sebelumnya mungkin belum secara rinci menggali dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan nelayan dalam mengakses produk asuransi syariah. Oleh karena itu, pendekatan yang menitikberatkan pada aspek ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Selain itu, implementasi program-program pendidikan dan pelatihan tentang asuransi syariah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas. Pentingnya pendidikan menjadi sorotan dalam merancang strategi pengembangan pembiayaan pertanian (Prayoga 2019). Namun, belum cukup banyak literatur yang secara spesifik membahas efektivitas program-program pendidikan ini dalam konteks peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang memperdalam analisis terhadap dampak program pendidikan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Selanjutnya, aspek regulasi dan kebijakan publik juga merupakan faktor krusial dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Regulasi yang memadai dan mendukung, serta kebijakan yang inklusif, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di sektor perikanan. Namun, belum banyak literatur yang secara khusus membahas tentang implikasi kebijakan ini bagi aksesibilitas asuransi syariah di level lokal, terutama dalam konteks nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Oleh karena itu, studi yang mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang bagaimana regulasi dan kebijakan publik memengaruhi aksesibilitas asuransi syariah di tingkat lokal dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman praktis dan teoritis.

Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga peraturan daerah. Program Asuransi Nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya, sedangkan tujuannya

adalah memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami nelayan dan memberikan kesadaran nelayan untuk berasuransi.

Tidak kalah pentingnya adalah memahami peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Selain menjadi penyedia layanan asuransi, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dalam pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian lanjutan yang mengevaluasi efektivitas peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kontribusi sektor keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi lokal.

Di samping itu, aspek teknologi dan inovasi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempermudah proses pendaftaran, pembayaran premi, dan klaim asuransi, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses bagi nelayan. Namun, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan teknis dan sosial dalam penerapan teknologi ini di lingkungan nelayan, serta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan aspek kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi nelayan, dan komunitas lokal dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung program-program asuransi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian yang mendalam tentang model-model kemitraan yang efektif dan inovatif dapat memberikan panduan praktis bagi pengembangan strategi kemitraan yang lebih baik di masa depan.

Dalam melengkapi pembahasan ini, perlu juga dipertimbangkan tentang bagaimana asuransi syariah dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial nelayan terhadap risiko-risiko yang dihadapi, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga, dan bencana alam. Pengembangan produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik nelayan, serta mekanisme pembiayaan yang fleksibel, dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan mereka.

Secara keseluruhan, melanjutkan pembahasan ini dengan memperhatikan aspek-aspek yang belum tercakup sebelumnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman yang lebih holistik tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Dengan demikian, dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan inklusif dalam mendukung perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi nelayan di wilayah tersebut.

Dalam melanjutkan diskusi mengenai peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi program-program tersebut. Salah satu faktor penting adalah kondisi geografis dan lingkungan sekitar. Sebagai wilayah pesisir, nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, rentan terhadap berbagai risiko, seperti badai, gelombang tinggi, dan bencana alam lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian khusus dalam desain produk asuransi syariah untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi nelayan dalam menghadapi risiko-risiko ini.

Pemerintah sudah menyusun strategi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penyusunan rencana strategis dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana strategis ini adalah agar aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Takalar memiliki pandangan yang sama terhadap arah pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan maka dinas akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan agar nelayan paham dalam pengelolaan usaha nelayan, peningkatan produksi hingga membantu akses pemasaran, maka dari itu nelayan perlu dibina serta nelayan akan dibekali dengan inovasi teknologi penangkapan, agar nelayan bisa mencari ikan lebih jauh, karena semakin jauh nelayan itu menjelajah semakin banyak hasil tangkapan yang mereka dapatkan, secara tidak langsung pendapatan mereka akan bertambah.

Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga peraturan daerah. Program Asuransi Nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang di rancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya, sedangkan tujuannya adalah memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami nelayan dan memberikan kesadaran nelayan untuk berasuransi.

Selain itu, aspek sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Nilai-nilai lokal, tradisi, dan norma sosial dapat memengaruhi sikap dan perilaku terhadap asuransi. Misalnya, dalam beberapa budaya, konsep gotong royong dan solidaritas sosial telah menjadi bagian integral dalam mengatasi risiko-risiko ekonomi. Oleh karena itu, memahami dinamika budaya dan sosial masyarakat nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, dapat membantu dalam merancang program-program asuransi syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.

Penting juga untuk mempertimbangkan peran penting dari pemimpin lokal dan tokoh masyarakat dalam mendukung adopsi asuransi syariah di kalangan nelayan. Sebagai agen perubahan sosial, pemimpin masyarakat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi nelayan dalam program asuransi syariah. Dengan membangun kemitraan yang kuat antara pemimpin lokal, lembaga keuangan syariah, dan komunitas nelayan, dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di wilayah tersebut.

Selanjutnya, teknologi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang baru dalam menyediakan layanan asuransi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Penggunaan platform digital dan aplikasi seluler dapat mempermudah proses pendaftaran, pembayaran premi, dan pengajuan klaim, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses bagi nelayan di wilayah pesisir.

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Orang awam mengartikan "kesejahteraan sosial sebagai suatu situasi dan kondisi pribadi dan sosial yang menyenangkan". Ada pula yang menggambarkan dengan kalimat "segala sesuatu yang serba beres". Tidak ada hambatan, gangguan dan halangan, sehingga semuanya berjalan lancar.

Ada pula ungkapan dalam bahasa inggris "everything is running well". Semuanya itu adalah ungkapan-ungkapan tentang arti kesejahteraan sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu kondisi hidup dan kehidupan yang baik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif, dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan. Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta membuat seseorang yang kebetulan masih miskin menjadi tidak miskin lagi.

Peningkatan kesejahteraan hidup ini merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup seseorang setapak demi setapak untuk penghidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih dalam posisi dibawah garis kemiskinan. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Namun, perlu diakui bahwa adopsi teknologi ini mungkin menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan akses dan pemahaman teknologi di kalangan nelayan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi digital dan menyediakan pelatihan yang sesuai bagi nelayan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam mengakses layanan asuransi syariah.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, peran lembaga internasional dan donor dalam mendukung pengembangan asuransi syariah bagi nelayan juga perlu diperhatikan. Bantuan teknis, pendanaan, dan kerjasama lintas negara dapat memberikan dorongan tambahan bagi pengembangan industri asuransi syariah di Kecamatan Bantan, Bengkalis. Namun, perlu diingat bahwa keberlanjutan program-program tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat, dan upaya harus dilakukan untuk membangun kapasitas lokal dalam jangka panjang.

Selanjutnya, aspek lingkungan dan keberlanjutan juga harus menjadi perhatian utama dalam merancang program asuransi syariah bagi nelayan. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerusakan ekosistem dapat meningkatkan risiko-risiko yang dihadapi oleh nelayan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan dalam desain produk asuransi syariah, serta membangun kapasitas adaptasi dan mitigasi risiko di kalangan nelayan.

Terakhir, penting untuk mencermati isu-isu keadilan dan kesetaraan dalam aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa program-program asuransi syariah tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu atau yang lebih mampu secara ekonomi. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa akses terhadap layanan asuransi syariah benar-benar merata dan adil bagi semua nelayan, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan kurang berkembang.

Dengan merangkum faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Perlu adanya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, pemimpin masyarakat, dan lembaga internasional, dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud perlindungan finansial yang lebih baik dan keberlanjutan ekonomi yang lebih kokoh bagi nelayan di wilayah tersebut.

Upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada risiko, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan dan akan berdampak pada hilangnya pendapatan dari nelayan serta sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Masalah-masalah tersebut sangat menghambat upaya peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan nelayan sehingga diperlukan program terintegrasi yang bisa menjawab problematika sosial, ekonomi dan lingkungan nelayan.

Implementasi asuransi nelayan, kemudian dioperasionalkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dengan menerbitkan Kartu Nelayan yang kemudian melalui PERMEN KP No 70 tahun 2017 diterbitkan lagi kartu identitas tentang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu Nelayan ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, penting untuk merangkum temuan utama yang telah dibahas dalam pembahasan mengenai peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, serta menyoroti implikasi dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Pertama, peningkatan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan finansial dan ekonomi mereka. Asuransi syariah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko-risiko yang melekat pada profesi nelayan, seperti kerusakan peralatan, kecelakaan, dan kerugian akibat bencana alam.

Kedua, berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penghambat dalam aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan, termasuk birokrasi yang kompleks, keterbatasan literasi keuangan, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat asuransi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Ketiga, pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan dalam merancang program-program asuransi syariah yang efektif dan inklusif bagi nelayan. Hal ini meliputi penyediaan edukasi dan pelatihan tentang asuransi syariah, peningkatan literasi digital, serta integrasi pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan dalam desain produk asuransi.

Keempat, peran pemimpin masyarakat dan tokoh lokal sangat penting dalam mendukung adopsi asuransi syariah di kalangan nelayan. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi nelayan dalam program-program asuransi syariah.

Kelima, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas asuransi syariah bagi nelayan. Penggunaan platform digital dan aplikasi seluler dapat mempermudah proses administrasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi nelayan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik.

Keenam, penting untuk memasukkan aspek kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program-program asuransi syariah. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di wilayah tersebut.

Ketujuh, kesetaraan dan keadilan dalam aksesibilitas asuransi syariah juga perlu dijaga. Program-program asuransi syariah harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik nelayan secara menyeluruh, serta memastikan bahwa akses terhadap layanan asuransi merata dan adil bagi semua nelayan, tanpa terkecuali.

Dengan demikian, diharapkan upaya-upaya ini dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan finansial dan keberlanjutan ekonomi nelayan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, serta membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan mereka dan kemajuan wilayah tersebut secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ashari, Denny Rakhmad Widi, Atina Hidayati, Mohammad Basid Al Haris, Fajrina Eka Wulandari, Muhamad Aji Purwanto, Samlatul Izzah, Evita Novilia, Akhmad Rifa'i, Setyoadi Pambudi, and Siti Patimah. 2023. *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*. Get Press Indonesia.
- Kurnia, Tuti, Wildan Munawar, Maya Apriyana, Romi Apriliansyah, Aldi Wijaya, Risma Risdiani, Aulia Yasmin Syah, and Syidiq Syaifussalam. 2021. "MODEL PERENCANAAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS NELAYAN PALABUHANRATU PADA PERBANKAN SYARIAH." *Junal Nisbah* 7 (2): 117-26.
- Lubis, Fauzi Arif. 2023. "ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN KEUANGAN MASYARAKAT: STUDI MODAL SOSIAL DAN DINAMIKA PENDAPATAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII (1): 49-59.
- Prayoga, Adistiar. 2019. "IMPLEMENTASI MODEL BERLIAN PORTER DALAM PENYUSUNAN IMPLEMENTATION OF PORTER ' S DIAMOND MODEL IN THE STRATEGIC ARCHITECTURE FOR AGRICULTURAL FINANCING." *Jurnal of HJalal Product and Research* 2 (2): 86-105.
- Ramadhan, Abdul Rahman. 2023. "THE TRANSFORMATION OF SHARIA ACCOUNTING IN PROMOTING SUSTAINABILITY ECONOMIC GROWTH." *BALANCE: JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING* 4 (2): 101-24. <https://doi.org/10.21274/balance>.
- Saputra, Andrian, and Muhamad Aji Purwanto. 2023. "JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis)." *QAWANAN: JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW* 7 (1): 68-80. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>.